
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA TENGAH DI JAWA TENGAH

Laeli Sugiyono¹

¹Fungsional Statistisi Madya di BPS Provinsi Jawa Tengah

Email : laeli @bps.go.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the disclosure of the distribution of the position of Regency / City in Central Java based on the Linkage of Economic Growth (EG) and Human Development Index (HDI). The study uses secondary data in the form of cross-sectional regional Regency / City based on EG and HDI Components. Data analysis uses Regency / City distribution plot diagram based on EG and HDI components in the Cartesian diagram which divides the space into 4 quadrants, namely: Awareness I of the City Regency Distribution Plots with high EG and HDI Categories, Quadrant II City Regency Distribution Plots with High HDI Categories, Low EG, Quadrant III HDI Low, High EG, and Quadrant IV Low HDI and EG Categories. This study concludes that the position of Cities in Central Java in general is in line with the Quadrant I group, the HDI of Kota Regency in the area of the ex-Semarang residency and the former residence of Surakarta is in Quadrant I. Whereas other City Regencies are spread in Quadrant II, III, and IV.

Keywords : *Human Development Index, Economic Growth, Central Java City Regency Distribution Plots according to HDI and PE Components.*

PENDAHULUAN

Visi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) adalah “*Jawa tengah berdikari dan semakin sejahtera.*” Untuk mewujudkannya didasarkan pada tiga modal bangsa meliputi modal manusia, modal alam dan fisik serta modal sosial. Modal manusia memfokuskan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas kemiskinan. Modal alam dan fisik dengan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan. Dan, modal sosial dengan mewujudkan sinergi kelompok birokrasi wirausaha dan pekerja menuju daya saing global.

Makna filosofis yang terkandung dalam Visi Provinsi Jateng Jawa Tengah

diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Mandiri. Artinya bahwa pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukan berarti situasi dan kondisi dalam keterisolasian.

Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya

Guna mencapai sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi professional serta berwawasan kedepan yang luas maka diperlukan suatu perencanaan yang terarah dan terukur terhadap pembangunan manusia.

Di era modern saat ini pembangunan manusia (*human development*) telah mengalami pergeseran makna. Jika dua-tiga dekade yang lalu, pembangunan manusia diukur hanya berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, maka dewasa ini konsep tersebut telah berkembang seiring perkembangan waktu. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses [1].

Koneksi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terbentuk dalam dua rantai yang menunjukkan hubungan yang signifikan di kedua arah, terutama terkait dengan dengan pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan, tingkat investasi dan

distribusi pendapatan yang signifikan [3]. Variabel Kesehatan dan pendidikan tidak lain tidak bukan merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan manusia.

United Nations Development Programme (UNDP) mendeskripsikan bahwa dimensi pembangunan terdiri atas dua aspek: Pertama, peningkatan kemampuan manusia, yang terdiri peningkatan waktu hidup yang lebih lama dan sehat, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar hidup yang layak. Kedua, penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia. Beberapa elemen yang terkait dengan hal tersebut adalah partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman bagi setiap individu, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial [5]. Untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah maka disajikan analisis tentang situasi pembangunan manusia yang komprehensif mencakup dimensi waktu dan spasial wilayah.

METODELOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Data yang digunakan adalah Sebaran Kabupaten Kota menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara series selama tahun 2010-2018.

Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif memberikan gambaran situasi data menurut pengukuran tendensi pusat seperti rata-rata dan persentase, serta pengukuran distribusi data yang disajikan kedalam gambar grafik yang mudah difahami.

2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung dengan output perkapita, dimana dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduknya [2]. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu $PDRB_{(t)}$ dengan PDRB sebelumnya $PDRB_{(t-1)}$. Pertumbuhan linear digunakan untuk menyatakan perkembangan dari suatu perubahan dari PDRB tahun tertentu $PDRB_{(t)}$ dengan PDRB tahun sebelumnya $PDRB_{(t-1)}$, yaitu:

$$PDRB_{(t)} = (1 + r) PDRB_{(t-1)}$$

Tingkat pertumbuhan atau perkembangan dihitung sebagai berikut:

$$r = \frac{\ln PDRB_{(t)} - \ln PDRB_{(t-1)}}{n} \times 100\%$$

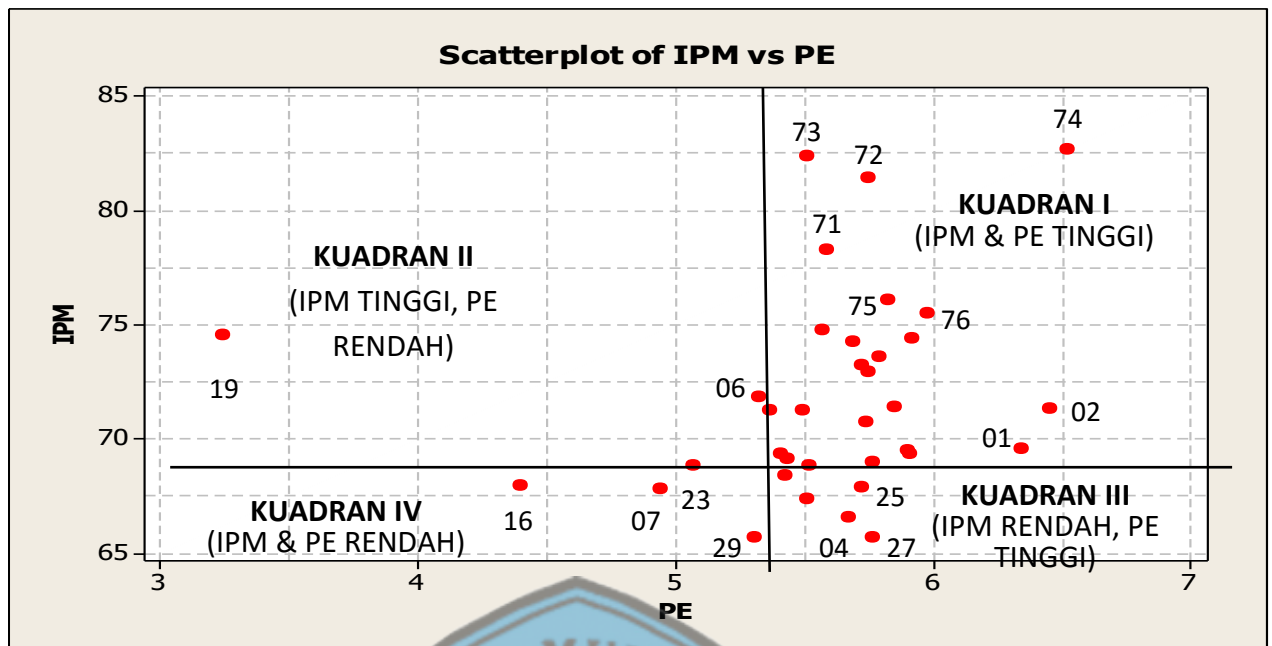
3. Analisis keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PE) digunakan diagram karesius yang membedakan angka IPM Kabupaten Kota kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu

Kuadran 1: Kelompok IPM Kabupaten/Kota Tinggi dengan kategori Tingkat PE Tinggi. Angka IPM atau PE Tinggi jika Angka IPM Kabupaten/Kota atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Angka IPM rata-rata Provinsi atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi rata-rata Provinsi. Sebaliknya Angka IPM atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Rendah jika Angka IPM Kabupaten/Kota atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota lebih rendah dari Angka IPM rata-rata Provinsi atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi rata-rata Provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Kabupaten Kota menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam seperti yang divisualisasi dalam diagram karesius dimana sumbu garis vertikal adalah IPM dan sumbu garis mendatar adalah PE. Dari diagram tersebut terbentuk empat ruang yang bisa didiskripsikan kedalam: 1). Kuadran I (IPM Tinggi dan PE Tinggi), Tinggi didefinisikan apabila angka IPM atau PE Kabupaten/Kota lebih tinggi dari IPM atau PE reratanya yang dicirikan oleh angka tingkat provinsi Jawa Tengah; 2). Kuadran II (IPM Tinggi tetapi PE Rendah); 3). Kuadran III (IPM Rendah tetapi PE Tinggi); dan 4). Kuadran IV (IPM dan PE Rendah). Rendah didefinisikan apabila angka IPM atau PE Kabupaten/Kota lebih rendah dari IPM atau PE reratanya yang dicirikan oleh angka tingkat provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Sebaran Kabupaten Kota menurut Angka IPM dan PE Provinsi Jawa Tengah 2018

Hasil plot sebaran Kabupaten Kota berdasarkan variabel Indeks Pembangunan Manusia dan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang tercermin dalam gambar 1, yang dikelompokkan menurut:

1. Kuadran I (IPM dan PE Tinggi), yaitu: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap,
2. Kuadran II (IPM Tinggi, PE Rendah), yaitu: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo.
3. Kuadran III (IPM Rendah, PE Tinggi), yaitu: Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Rembang.
4. Kuadran IV (IPM dan PE Rendah), yaitu: Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Brebes.

Kabupaten Kota di wilayah eks Kesidenan Semarang dan eks Kresidenan Surakarta berada di Kuadran I. Sedangkan Kabupaten Kota lainnya berada di Kuadran II, III, dan IV. Posisi Kota-Kota di Jawa Tengah secara umum sudah sesuai jalurnya berada pada kelompok Kuadran I (IPM dan PE Tinggi).

Dua kabupaten yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo memiliki IPM Tinggi tetapi tidak didukung oleh PE yang Tinggi sehingga berada pada posisi Kuadran II (IPM Tinggi, PE Rendah). Secara series selama tahun 2010-2018, ternyata *trend* pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah cenderung meningkat positif, tetapi pada titik di tahun 2018 PE di wilayah Kudus tercatat Rendah karena sub sektor industri kretek yang sedang mengalami perlambatan, dimana sub sektor ini menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus sehingga tentunya berpengaruh signifikan terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.

Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Rendah, akan tetapi kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus yang konsisten dan fokus dalam pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan telah memberikan bukti kuat dalam keberhasilannya membangun kualitas sumberdaya manusia yang tercermin oleh angka Indeks Pembangunan Manusia yang Tinggi.

Program Pendidikan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Kudus yang konsisten dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas dengan anggaran pendidikan tahun 2016 mencapai Rp.720,7 milyar atau sekitar 37% dari APBD dan Program pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan pendampingan BOS mencapai Rp. 33,27 milyar yang menyebabkan tingkat partisipasi sekolah dalam jenjang SD hingga SLTA melalui Program Kelompok Belajar Paket A, B, dan C meningkat secara signifikan [3].

Selain gencarnya program pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kudus juga fokus dalam pembangunan pelayanan kesehatan melalui akreditasi standarisasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Pelayanan kesehatan yang prima dan biaya murah mendorong meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini terungkap dalam berita [4]. Dua program pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten di Kabupaten Kudus menjawab mengapa angka PE Rendah masih bisa mencapai IPM Tinggi.

Kabupaten Purworejo yang kontribusi terbesarnya berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada tahun 2018 juga mengalami perlambatan sehingga berpengaruh pada agregasi PE tingkat kabupaten Rendah. Seperti halnya Kabupaten Kuyudus, Kabupaten Purworejo juga gencar membangun bidang pendidikan melalui Kejar Paket

A, B, dan C yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kelompok Kuadran III (IPM Rendah, PE Tinggi). Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Pemalang belum memberikan hasil yang menggembarkan yang tergambar oleh tingkat partisipasi sekolah dari tingkat dasar dan menengah yang masih stagnan Rendah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tergolong Tinggi, akan tetapi akumulasi ekonomi yang ditimbulkannya belum serta merta diinvestasikan di sektor pendidikan.

Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Batang dan Banjarnegara. Ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus diselesaikan apabila tidak ingin pembangunan manusia tertinggal di wilayah Jawa Tengah. Meniru program nyata sektor pendidikan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo, seyogyanya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara bisa lebih maju dan lebih baik dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo. Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Brebes masuk dalam Kuadran IV (IPM dan PE Rendah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar 71.12 tergolong IPM tinggi.
- Di Kawasan regional pulau Jawa IPM Provinsi Jawa Tengah

berada pada peringkat keempat setelah Provinsi Jawa Barat sebelum Provinsi Jawa Timur.

- c. IPM Kabupaten Kota di wilayah eks Kresidenan Semarang dan eks Kresidenan Surakarta berada pada Kuadran I. Sedangkan Kabupaten Kota lainnya berada pada Kuadran II, III, dan IV.
- d. Posisi Kota-Kota di Jawa Tengah secara umum sudah sesuai jalurnya berada pada kelompok Kuadran I (IPM dan PE Tinggi).
- e. Dua kabupaten yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo memiliki IPM tinggi tetapi tidak didukung oleh PE yang tinggi sehingga berada pada posisi Kuadran II (IPM Tinggi, PE Rendah)
- f. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kelompok Kuadran III (IPM Rendah, PE Tinggi).
- g. Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Brebes masuk dalam Kuadran IV (IPM dan PE Rendah).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan:

- a. Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah untuk fokus meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi wilayah guna menstimulus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Disamping program meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, perlu didukung program nyata untuk meningkatkan komponen IPM, yaitu ZSektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Pembangunan manusia*. Metode Baru. Badan Pusat Statistik 2014.
- [2] Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFU-UGM, Yogyakarta
- [3] Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus. 2016, *Program pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kudus*. (www.disdikpora.kuduskab.go.id).
- [3] Ranis dan Stewart, 2000. *Economic Growth and Human Development*. *World Development*, Vol. 28, No. 2, pp. 197±219, 2000. *Pergamon. Printed in Great Britain*.
- [4] Rmoljateng, Juli 2019, *Bupati Kudus Fokuskan Peningkatan Pelayanan Kesehatan*, www.rmoljateng.com, 18
- [5] UNDP, 2015. *Human Development Report 2015. United Nation Development Programme. UN Plaza, New York, NY 10017, USA*.